
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI DESA BINUANG KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Farhanuddin Jamanie

Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

Abstract: *The research will examine the participation of society in Independent National People Empowerment Program (PNPM Mandiri) in Binuang village Sepaku Sub District, Petajam Paser Utara Regency for the following aspects: people participation in planning the program, the implementation of the program based on the guidelines, the evaluation based on what have been achieved, the socialization based on people consensus. The hindering factors of the program are the lack of human resources, low economic power and lack of socialization.*

Keywords: “ **People Participation, PNPM**”

Abstrak: *Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara, yaitu dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan partisipatif berdasarkan keikutsertaan masyarakat, Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan program kerja PNPM Mandiri, Evaluasi berdasarkan hasil program, sosialisasi berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD). Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara yaitu hambatan internal terbatasnya SDM, tingkat perekonomian yang rendah, kurangnya sosialisasi pelaksanaan PNPM Mandiri.*

Kata Kunci : “**Partisipasi Masyarakat, PNPM**”

Pendahuluan

Dalam era globalisasi, pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab. Untuk itu kebijakan yang diambil pemerintah pusat yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat dan didukung dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal c menyebutkan “... bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas,

nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Negara Republik Indonesia persoalan sosial salah satunya adalah Kemiskinan. Di Indonesia Persoalan kemiskinan lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Di dalam Surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEPMENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dijelaskan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan hanya sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Seiring dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, Desa Binuang merupakan salah satu yang menjadi target dari PNPM Mandiri Perdesaan, yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara Kecamatan Sepaku. Dengan kehadiran PNPM Mandiri Perdesaan, kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki diharapkan akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan di Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Selain itu juga dalam rangka mencapai Visi dan Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, selain menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasarannya peran serta partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat menentukan.

Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, dan Tujuan Partisipasi

Partisipasi adalah Suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya (Soegarda Poerbakawatja, 1981:251).

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007:27).

Partisipasi merupakan hak dan kewajiban seorang warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka berkesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran. Partisipasi memiliki tujuan, menurut Schiller dan Antlov (dalam Hetifah 2003:152) tujuan dari partisipasi adalah :

1. Menciptakan Visi Bersama
Merumuskan misi dan mandat serta nilai-nilai yang dianut atau menjadi dasar suatu organisasi serta visi itu kedepan. Tujuannya adalah untuk menyajikan kebenaran yang definit, tapi lebih untuk menstimulasi debat dan bagaimana mempengaruhi masa depan.
2. Membangun rencana
Setelah perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, maka dengan bekal itu, dapat segera dibuat suatu proses lanjutan untuk membangun rencana.
3. Mengumpulkan Gagasan
Dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis, dengan maksud mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan dari semua orang yang menjadi peserta proses partisipasi.
4. Menentukan Prioritas (Membuat Pilihan)
Bertujuan untuk mengorganisir berbagai ide yang muncul dalam proses partisipasi dengan memanfaatkan metode kuantitatif.
5. Menjaring Aspirasi (Masukan)
Bertujuan untuk pertukaran informasi, gagasan dan kepedulian tentang suatu isu atau rencana antara pemerintah, perencanaan dengan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan, memberikan alternatif desain, pilihan investasi beserta pengelolaannya.
6. Mengumpulkan informasi (Analisis Situasi)
Bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang serta bagaimana mengoptimalkannya. Selain mengidentifikasi kelemahan dan ancaman untuk mempermudah merumuskan langkah-langkah untuk mengatasinya.

Pengertian PNPM Mandiri

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta

berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Partisipasi Masyarakat desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Partisipasi Masyarakat Desa Binuang Dalam Perencanaan PNPM Mandiri

Pengkajian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Binuang kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Binuang kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Penulis mengajukan pertanyaan kepada key informan dan informan terkait mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Binuang kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara serta faktor penghambat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Binuang kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Partisipasi Masyarakat desa dalam Perencanaan PNPM Mandiri

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ini hakikatnya hanya meliputi penentuan tujuan oleh masyarakat dari serangkaian kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan potensi sumber-sumber yang ada di masyarakat. Perencanaan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam program PNPM Mandiri, program yang sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang terakhir tentang keterlibatan masyarakat dalam penentuan tujuan dari serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bahwa perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan PNPM mandiri di desa Binuang, pemerintah desa akan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Murambangdes) meskipun tidak keseluruhan masyarakat ikut dalam murembangdes hanya dihadiri oleh perwakilan-perwakilan warga, yaitu ketua Rt, tokoh masyarakat, tokoh Agama dan beberapa warga yang datang sebagai perwakilan. Di dalam Musrebangdes nantinya masyarakat akan menyampaikan usulan-usulan terkait masalah pembangunan tentang pembangunan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat Desa Binuang sangat berharap dalam pelaksanaan Musrebangdes agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan dan dapat memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Desa Binuang, kekurangan yang ada pada pelaksanaan Musrebangdes masyarakat berharap agar segera diperbaiki waktu pelaksanaannya, demi mencapai tujuan dan keinginan bersama.

Partisipasi Masyarakat desa dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip-prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNP Mandiri Perdesaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri dapat dilihat dari proses pelaksanaan PNPM Mandiri itu sendiri seperti keaktifan masyarakat untuk ikut melaksanakan pekerjaan dengan memberikan kontribusi berupa uang, tenaga serta pikiran untuk menunjang setiap program yang ada. Kaho (2003:128) menjelaskan “Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberi kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang atau informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik, dalam hal ini tenaga yang melakukan pembangunannya itu sendiri dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan tidak adanya perbedaan di dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa serius di dalam memberdayakan masyarakatnya, karna tidak menggunakan tenaga dari luar, selain itu pemerintah desa juga memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakatnya. Keikutsertaan masyarakat ini mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut ingin berkembang dan memiliki pembangunan di desanya tersebut.

Partisipasi Masyarakat desa dalam Evaluasi PNPM Mandiri

Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mendapatkan *feed-back* terhadap perencanaan berikutnya. Hanya sedikit proyek dan program rinci yang memiliki evaluasi didalamnya. Evaluasi bisa dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya (Dari awal-sedang berjalan-akhir) serta siapa yang melaksanakannya (Internal dan Eksternal). Terdapat beberapa kondisi agar evaluasi bisa dilaksanakan yaitu tujuan yang harus dapat diukur, sumber daya yang dibutuhkan, bagaimana, kapan, dimana dan siapa yang harus menyediakan dan menggunakan.

Evaluasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan Evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan evaluasi dilakukan langsung oleh tim UPK. Setelah selesainya program PNPM hasil

dari evaluasi yang dilakukan oleh tim UPK akan dibahas di dalam rapat, tim UPK akan memberikan hasil dari evaluasi yang mereka lakukan selama pelaksanaan program PNPM yaitu berupa foto copy yang akan mereka bagikan di dalam rapat tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat terlihat di dalam pemberian saran atau masukan bagi pemerintah desa maupun tim UPK. Masyarakatlah yang menilai dari hasil evaluasi tersebut apakah di dalam evaluasi tersebut sesuai dengan yang ada di lapangan atau tidak. Masyarakat berperan penting di dalam hal ini karena, masyarakat nantinya akan menilai apakah pemerintah desa transparan atau tidak.

Partisipasi Masyarakat desa dalam Sosialisasi PNPM Mandiri

Sosialisasi yang dilakukan di desa Binuang adalah awal dari tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam sosialisasi musyawarah yang dilakukan berlangsung terbuka untuk anggota masyarakat lainnya yang berminat yang juga dihadiri oleh Camat, staf-staf terkait, wakil instansi sektoral kecamatan (ISK). Sebagai narasumber (pembicara) dalam pertemuan sosialisasi adalah: TPK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, Camat dan Instansi tingkat kecamatan terkait. Sedangkan fasilitator pertemuan tersebut adalah UPK dan Kecamatan

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam sosialisasi PNPM Mandiri terlihat dengan keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi program yang diadakan di Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara serta tidak hanya ikut dalam sosialisasi, masyarakat juga ikut membantu pemerintah desa dalam menginformasikan hasil dari sosialisasi tersebut kepada masyarakat desa yang tidak ikut hadir dalam sosialisasi, karena tidak semua masyarakat yang ada di Desa Binuang hadir dalam sosialisasi. Sehingga partisipasi masyarakat dalam sosialisasi PNPM Mandiri sangat terlihat untuk mensukseskan program tersebut.

Faktor Penghambat Partisipasi masyarakat desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan program PNPM Mandiri di Desa Binuang tidak terlepas dari hambatan-hambatan masyarakat dalam keikutsertaannya, persoalan yang timbul di dalam pelaksanaan PNPM Mandiri penulis membagi menjadi 2 hambatan yaitu internal (di dalam) dan eksternal (di luar) sebagai berikut :

1. Hambatan internal

Selama pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Binuang Kecamatan Sepaku terdapat hambatan-hambatan masyarakat dalam berpartisipasi di dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, hambatan internal atau yang berasal dari masyarakat, dalam pelaksanaan program ini permasalahannya adalah sumber daya manusia. Selain itu hambatan yang ditemukan di dalam masyarakat Desa Binuang dalam pelaksanaan PNPM Mandiri adalah masalah perekonomian masyarakat, ini sangat mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam

keikutsertaannya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena masyarakat lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di bandingkan ikut berpartisipasi dalam Program PNPM ini. Masyarakat di dalam partisipasinya masih tidak mengerti dan tidak peduli terhadap pembangunan yang ada di desa Binuang, mereka masih terlalu sibuk dengan urusan mereka dalam mencari kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga menjadi salah satu hambatan masyarakat dalam berpartisipasi di dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Masyarakat yang selalu tergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Ketergantungan masyarakat kepada pemerintah merupakan hambatan yang paling utama. Sikap masyarakat inilah yang tidak mendukung program PNPM Mandiri sehingga menghambat pembangunan di desa mereka.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan-hambatan eksternal atau hambatan yang datang dari luar masyarakat yang menghambat partisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri yaitu dana pencairan yang dinilai terlalu lama dan tidak sesuai dengan apa yang di minta oleh desa serta faktor alam yang seringkali tidak mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan hingga sering kali terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya. Jarak yang jauh juga di nilai cukup mempengaruhi karena jarak desa dengan kecamatan yang cukup jauh sehingga koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan pun menjadi lambat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bahwa masyarakat sebenarnya sudah siap dalam pelaksanaan pembangunan PNPM Mandiri hanya saja keterlambatan pencairan dana lah yang menghambat keinginan masyarakat, dikarenakan keterlambatan tersebut akan menghambat proses pelaksanaan pembangunan. Disamping itu pemerintah kabupaten juga di nilai tidak maksimal dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan, akhirnya partisipasi masyarakat pun terhambat dalam membantu pelaksanaan pembangunan.

Kesimpulan

1. Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binuang masih belum optimal, dikarenakan masih adanya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pembangunan desa, hal ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kecamatan dinilai kurang dalam memberikan sosialisasi di dalam PNPM Mandiri, pendekatan dengan masyarakat pun kurang sehingga masyarakat pun kurang tertarik dalam pelaksanaan pembangunan ini, meskipun pembangunan ini untuk mereka juga.
2. Partisipasi masyarakat Desa Binuang dalam perencanaan PNPM Mandiri masih berada pada tingkat konsultasi, dimana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan walau tingkat kehadirannya belum sepenuhnya maksimal. Dalam hal perencanaan ini masyarakat sudah diberikan kebebasan dalam mengajukan pendapat-pendapat. Namun dalam memberikan usulan tersebut belum ada jaminan akan dilaksanakan, karna usulan tersebut akan dibahas lagi di Kecamatan.

3. Partisipasi masyarakat Desa Binuang dalam pelaksanaan PNPM Mandiri telah dilakukan dalam bentuk memberikan tenaga, uang dan pikiran, terutama dalam hal pemberi gagasan atau pendapat masih sangat terbatas. Partisipasi dalam tingkat ini difungsikan sebagai komunikasi satu arah dan tidak terbuka kesempatan untuk memberikan pendapat.
4. Partisipasi masyarakat Desa Binuang dalam Evaluasi PNPM Mandiri, dalam hal ini masyarakat tidak secara keseluruhan ikut berpartisipasi saat pengevaluasian yang dilakukan oleh tim UPK. Karena dalam evaluasi program PNPM Mandiri tim Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang melakukan evaluasi secara keseluruhan. Bentuk partisipasi masyarakat desa Binuang dalam evaluasi program PNPM Mandiri adalah kehadiran masyarakat di dalam rapat hasil evaluasi yang diadakan oleh tim UPK, dalam rapat tersebut nantinya masyarakat akan memberikan tanggapan atau memberikan saran mengenai hasil evaluasi program PNPM Mandiri yang dilakukan tim UPK.
5. Partisipasi masyarakat Desa Binuang dalam Sosialisasi PNPM Mandiri, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dinilai masih kurang sehingga masyarakat masih belum paham akan program pelaksanaan pembangunan PNPM Mandiri, sehingga masih banyak masyarakat yang akhirnya enggan untuk berpartisipasi. Di dalam partisipasi masyarakat, pemerintah mengharapkan bagi masyarakat yang hadir nantinya juga akan ikut membantu menginformasikan dan menjelaskan apa itu program PNPM Mandiri. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa memang tidak banyak dilakukan, hal ini dilakukan agar masyarakat desa menjadi mandiri tidak selalu bergantung kepada pemerintah.
6. Hambatan-hambatan yang ditemui pada partisipasi masyarakat Desa Binuang dalam pelaksanaan PNPM Mandiri terdiri atas hambatan internal yang dimana masih terbatasnya sumber daya manusianya kualitas dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pembangunan, tingkat perekonomian masyarakat yang masih rendah sehingga masyarakat lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari di bandingkan harus ikut dala partisipasi pembangunan. Sedangkan hambatan eksternalnya adalah adalah lamanya proses pencairan dana yang dilakukan secara bertahap sering sekali menghambat proses pembangunan dalam pelaksanaannya, pembuat keputusan masih di pegang oleh pemerintah Kabupaten serta tidak adanya pembinaan dari pihak pemerintah Kabupaten dan Kecamatan untuk masyarakat desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.

Saran

1. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RT dan segala unsur di Desa Binuang dapat lebih proaktif dalam menghimpun usulan warga serta kedekatan dengan warga lebih di dijaga.
2. Pemerintah Desa dan Kecamatan seharusnya lebih aktif dalam sosialisasi dengan warga, sehingga warga memiliki kepercayaan diri dalam ikut berpartisipasi.
3. Pemerintah desa dalam pembuatan surat pemberitahuan kepada warga atau ketua RT harus jauh hari sudah di edarkan sebelum musyawarah desa diadakan.

4. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan seharusnya lebih mempercayakan pelaksanaan kepada masyarakat desa, karna yang lebih mengerti akan kebutuhannya adalah masyarakat itu sendiri.
5. Seharusnya pemerintah Desa perlu mengusulkan pada pemerintah Kabupaten untuk dapat mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk tim pengelola kegiatan di dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga nantinya saat di dalam pelaksanaan masyarakat tidak perlu lagi di dampingi oleh pemerintah Kabupaten atau Kecamatan.
6. Masyarakat desa harusnya diberi kewenangan di dalam memberikan saran atau kritik dalam pengevaluasian program PNPM Mandiri, sehingga masyarakat desa akan merasa bahwa mereka dihargai di dalam partisipasinya.

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, KEPMENKO/KESRA//VII//2007 tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Intervensi komunitas. Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hetifah, Sumarto, Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Poerbakawatja, Soegarda. 1981. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.